

PERANAN PARTNERSHIPS IN THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR SEAS OF EAST ASIA (PEMSEA) MELALUI PROGRAM INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT (ICM) DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI INDONESIA (STUDI KASUS: PALABUHANRATU, KABUPATEN SUKABUMI- JAWA BARAT)

Rizki Rakhmawati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 116, Bandung, 40132, Indonesia

e-mail: rizki.rakhmawati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) through Integrated Coastal Management Program (ICM) for Controlling the Damages of the Coral Reefs Ecosystem in Palabuhanratu, Sukabumi Regency, West Java. Researcher attempted to analyze the purpose of doing damage control program in coral reef ecosystems that occur in coastal areas Palabuhanratu, Sukabumi Regency, West Java. Author of the research methods used in this study is descriptive analysis method. Most of the data have been gathered through library research, online data retrieval, documentation, interviews and observation. The results showed that the implementation of ICM in Palabuhanratu, Sukabumi, West Java has involved many sectors related to the management of the Marine and Coastal regions in Palabuhanratu Sukabumi, West Java, with the implementation of several development projects in the coastal region of Palabuhanratu since 2003. But technically still have not made a direct attempt to address the damage to the coral reefs that occur in Palabuhanratu because of the constraints faced. Efforts made in the control of coral reef damage is in the form of outreach to the local community Palabuhanratu coast of West Java since 2004.

Key words: PEMSEA, ICM, Damage Controlling, Coral Reefs Ecosystem

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan *Partnerships in the Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)* melalui Program *Integrated Coastal Management (ICM)* dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peneliti berusaha untuk menganalisis dari tujuan program dalam melakukan pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di wilayah pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ICM di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah melibatkan banyak sektor yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan dilaksanakannya beberapa proyek pengembangan di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2003. Namun secara teknis masih belum dilakukan upaya langsung untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu oleh karena kendala-kendala yang dihadapi. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian kerusakan terumbu karang masih dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat lokal pesisir Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sejak tahun 2004.

Kata Kunci: PEMSEA, ICM, Pengendalian Kerusakan, Ekosistem Terumbu Karang

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pemilik terumbu karang terluas di dunia (setelah Australia) dengan luas 42.000 kilometer persegi atau 17 persen dari luas terumbu karang dunia (*Tropicana Coasts Magazine* vol.16 No.2, 2010). Ekosistem terumbu karang tersebut tersebar di hampir dua per tiga garis pantai Indonesia yang panjangnya 81.000 km (SECEM, 2009:7) merupakan potensi sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya.

Terumbu karang yang merupakan tempat pembibitan (*nursery*) dan makanan (*feeding ground*) bagi banyak populasi organisme laut dan terancam kepunahan bagi spesies yang dikategorikan langka. Dengan keadaan ekosistem terumbu karang yang rusak tentunya dapat mengancam keberlangsungan geliat perekonomian negara disektor perikanan yang nantinya akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah. Akan tetapi sumberdaya tersebut masih belum terkelola dengan baik. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah kerusakan terumbu karang di beberapa tempat di wilayah Sukabumi. Saat ini diperkirakan kawasan terumbu karang tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi kurang baik sekitar 50% dalam keadaan rusak dengan tutupan kurang dari 10% (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi). Kerusakan tersebut terjadi dapat disebabkan oleh perilaku manusia. Sebagian besar penduduk lokal pesisir umumnya memiliki tingkat pendidikan yang masih minim sehingga pola pikir terhadap pengelolaan dan menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut masih terabaikan. Sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi acapkali menjadi hal yang lumrah.

Kerusakan terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu dapat dikatakan sebagai gejala yang terlihat dengan kasat mata dari hasil interaksi antara manusia dengan sumberdaya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Sehingga persoalan yang mendasar adalah mekanisme pengelolaan pesisir wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak efektif untuk memberi kesempatan kepada sumberdaya hayati pesisir yang dimanfaatkan pulih kembali atau pemanfaatan sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya alam lain dan mengeliminir faktor-faktor penyebab kerusakannya (SECEM, 2009:2).

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di daerah pesisir Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi maka diperlukan pengelolaan daerah pesisir dan laut yang terpadu melalui sistem manajemen kelautan yang apik guna untuk mengatasi masalah manajemen yang kompleks di daerah pesisir dan laut di Kabupaten Sukabumi. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut yang termasuk salah satu didalamnya ialah ekosistem terumbu karang. Karena terumbu karang menjadi salah satu bagian daripada ekosistem wilayah pesisir. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta yakni Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kelautan khususnya dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut. *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) sebuah Organisasi Internasional Pemerintahan yang bersifat regional, membangun kemitraan bagi negara-negara yang berdekatan dengan wilayah perairan laut di Asia Timur untuk bekerjasama dalam menyelamatkan Laut-laut yang ada di Asia Timur menjadi partner dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Sukabumi. Fokus PEMSEA adalah dalam bidang pengelolaan laut. PEMSEA

membuat *framework* berupa *Sustainable Development* untuk Laut Asia Timur yang selanjutnya disebut sebagai *Sustainable Development Strategy for Seas East Asia* (SDSSEA). Strategi pembangunan ini terus digalakkan kepada seluruh negara yang tergabung dalam PEMSEA yakni Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Thailand.

PEMSEA menjalin kemitraan khusus secara langsung dengan pemerintah lokal di suatu negara yang tergabung sebagai anggota PEMSEA yang disebut sebagai PEMSEA *Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development* (PNLG) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola sumber daya pesisir dan laut untuk pemanfaatan secara berkelanjutan.

Kabupaten Sukabumi dan PEMSEA yang saat itu masih menjadi program regional dari *International Maritime Organization* (IMO) sehingga penandatanganan dilakukan oleh IMO sendiri bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat menjadi proyek kerjasama antara PEMSEA dan Pemerintah Daerah Sukabumi dalam pengelolaan terpadu wilayah pesisir yang disebut sebagai *Integrated Coastal Management* (ICM) yang bertujuan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan dan sumber daya pesisir dan konservasi laut untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya yang dilakukan *Partnership in Environmental Management for Seas East Asia* (PEMSEA) melalui program *Integrated Coastal Management* (ICM) dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu

karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kondisi ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa program yang dilaksanakan PEMSEA dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kendala yang dihadapi PEMSEA dalam menjalankan program *Integrated Coastal Management*(ICM) di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa hasil pelaksanaan dari program *Integrated Coastal Management* (ICM)dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti dalam menyusun skripsi di bidang Ilmu Hubungan Internasional Untuk memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hubungan Internasional dalam kajian Lingkungan Hidup Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk

masalah yang sama. Sebagai salah satu syarat wajib untuk meraih gelar kesarjanaan (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam mendapatkan dan memperoleh pijakan dan referensi ilmiah untuk penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan referensi khusus dari keilmuan Hubungan Internasional, tetapi referensi dilihat juga dari bidang-bidang keilmuan lainnya. Peneliti menggunakan beberapa sumber dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama yaitu mengenai terumbu karang yang ada di pesisir Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu yang tidak lepas dari politik yang memiliki sejumlah fokus kajian antara lain:

1. Hubungan— saling ketergantungan (interdependensi) ekonomi, hutang dan ketergantungan Dunia Ketiga, perdagangan internasional, ketidaksetaraan, identitas politik dan kewarganegaraan model baru, rezim, komunitas negara-negara internasional, anarki, kerjasama ekonomi regional, keseimbangan kekuasaan, demokratisasi, keamanan pasca Perang Dingin;
2. Aktor— negara-bangsa, perusahaan transnasional, pasar modal, organisasi non-pemerintah, masyarakat politik supra-nasional dan sub-nasional, pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru, G7, IMF-Bank Dunia;

3. Isu-isu empiris—globalisasi dan isolasi, hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, persoalan perempuan, konservasi lingkungan, aids, narkoba, kejahatan terorganisir;
4. Isu-isu filsafat — permasalahan epistemologi, ontologi dan metodologi, perspektif gender, perdebatan antar paradigma, etika dan kebijakan luar negeri (Burchill& Linklater, 2009:12).

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dapat dicatat bahwa ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (constituent instrument) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 1987:10).

2.2.2.1 Teori Peranan Organisasi Internasional

Struktur yang terdapat dalam organisasi yang memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalankan agar tercapai tujuan dari pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut dijalankan dengan baik maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan peranan. Peranan tersebut selain ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat (Soekanto, 1981:221).

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kepentingan yang hendak dicapai, berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional itu antara lain:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang dilakukan antar negara dimana kerja sama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita & Yani, 2005:97).

2.2.3 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Isu lingkungan hidup menjadi perbincangan hangat di kancah dunia internasional pasca terjadinya perang dingin. Beberapa negara mulai menyadari pentingnya lingkungan untuk

kelangsungan hidup bagi generasi di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintahan ditingkat negara-bangsa khususnya dan bertambahnya persoalan kemerosotan lingkungan hidup yang sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon, maka isu lingkungan hidup diangkat dalam agenda percaturan internasional (Rudy, 2011: 58).

Masalah utama dari lingkungan hidup adalah pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut umumnya mempunyai sifat racun (toksin) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksinitas daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran. Ancaman yang muncul terhadap lingkungan hidup berasal dari dua jenis, yaitu ancaman yang alamiah dan ulah tangan manusia. Siklus dari unsur-unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup membentuk keseimbangan tersendiri dan keseimbangan itu akan berubah ketika mendapat pengaruh dari dua jenis ancaman itu (Rudy, 2011: 58).

2.2.3.1 Green Political Theory (Teori Politik Hijau)

Teori Hijau (Green Theory) muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan sejak 1970an sampai sekarang. Sejarah yang menjelaskan tentang lingkungan hidup telah diwariskan sejak abad 12. Hal ini dibuktikan dengan penebangan kayu hutan Babilonia, Yunani dan Italia ketika peradaban manusia baru berkembang serta adanya konservasi minyak di Mediterania dan peradaban Cina. Green Politics bermakna

ideologi politis, yang sangat kental dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan hidup, dan demokrasi partisipatoris. Konsep green politics mulai dibangun dalam bentuk gerakan konservatif sejak lahirnya Sierra Club di San Fransisco, tahun 1892. Klub tersebut menitikberatkan pada upaya-upaya konservasi dan preservasi alam. Politik lingkungan juga tak terlepas dari gerakan environmentalis Jerman, ditandai dengan berdirinya German Green Party (GGP) tahun 1980 (Matthew, 2001: 238).

2.2.4 Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan Lingkungan Hidup sebagai : —Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2.2.4.1 Lingkungan Hidup sebagai *Transboundary Issues*

Isu lingkungan menjadi sebuah isu yang lintas batas, hal ini disebabkan karena: (1) sumber daya yang ada bergerak melalui banyak negara, (2) kegiatan yang dilakukan di lingkungan laut, seperti pengiriman barang, memancing dan pergerakan migrasi spesies asing dan, melibatkan beberapa negara, dan (3) laut adalah media dimana polutan relatif mudah menular. Penyebab dan / atau dampak dari pada pergerakan yang terjadi melibatkan lebih dari satu negara dan respon yang dilakukan harus multilateral atau regional.

2.2.5 Ekosistem

Berbicara mengenai Lingkungan Hidup tentu tidak terlepas dari sistem ekologi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

Ekosistem menurut Benny Joseph dalam bukunya —Environment Studies mengemukakan ekosistem sebagai:

—Ekosistem adalah kumpulan biotik tanaman, hewan, dan mikroba, bila digabungkan dalam lingkungan fisik kimia. Dalam ekosistem terdapat pengelolaan kehidupan secara biologis oleh tiga kelompok, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer/daur ulang (Joseph, 2005: 73).

2.2.5.1 Ekosistem Laut

Ekosistem laut sebagai salah satu ekosistem di dunia, merupakan suatu dunia sendiri, di mana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen-komponen kehidupan yang serupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem daratan Indonesia salah satunya pemilik ekosistem laut terbesar, merupakan sebuah Negara Kepulauan yang daerah perairannya lebih luas daripada daratannya. Ekosistem air laut dibedakan atas ekosistem lautan, ekosistem pantai, ekosistem estuari (muara), dan ekosistem terumbu karang (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dari website resmi <http://pplhpuntondo.org/program/ekosistem-laut/> diakses pada 8 Februari 2012).

2.2.5.1.1 Ekosistem Terumbu Karang (*Coral Reefs*)

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga dengan demikian secara alamiah bangsa Indonesia merupakan bangsa bahari. Hal ini ditambah lagi dengan letak wilayah Indonesia yang strategis di wilayah

tropis. Hamparan laut yang luas merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan sumberdaya laut yang memiliki keragaman baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya lainnya.

2.2.6 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan yang sekarang sedang marak adalah pembangunan yang hanya bersifat sementara. Dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan jaman tanpa melihat prospek kedepan. Perkembangan masyarakat yang serba instan dan asal jadi, budaya konsumtif telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedang sebenarnya, hakikat pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan dan pembangunan kulit.

2.2.7 Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut

Pengelolaan sumberdaya alam merupakan agenda 21 Indonesia. Tiga sub- agenda dirumuskan dalam agenda ini yakni: (1) Konservasi keanekaragaman Hayati, (2) Pengembangan bioteknologi, dan (3) Pengelolaan Terpadu wilayah pesisir dan lautan (Mitchell, et al, 2007: 33).

2.2.7.1 Pengendalian Kerusakan Terumbu Karang

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang mendefinisikan pengendalian kerusakan terumbu karang sebagai: —Bahwa salah satu upaya untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria baku kerusakan; Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas

perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang; Status kondisi terumbu karang adalah tingkatan kondisi terumbu karang pada suatu lokasi tertentu dalam waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu kerusakan terumbu karang dengan menggunakan prosentase luas tutupan terumbu karang yang hidup.

3. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Gambaran Umum International Maritime Organization (IMO)

International Maritime Organization (IMO) merupakan organisasi internasional yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konvensi internasional yang berkaitan dengan pencemaran laut. IMO dibentuk pada tahun 1958 saat konferensi internasional Genewadiadakan mengenai tindakan efektif bagi negara-negara maritim untuk permasalahan pencemaran laut. Tujuan Organisasi, seperti yang dirangkum oleh Pasal 1 (a) Konvensi, adalah "untuk menyediakan mesin untuk kerjasama antara Pemerintah di bidang regulasi pemerintah dan praktik yang berkaitan dengan masalah teknis dari semua jenis pengiriman yang mempengaruhi terlibat dalam perdagangan internasional, untuk mendorong dan memfasilitasi adopsi umum dari standar tertinggi dalam hal-hal praktis tentang keselamatan maritim, navigasi dan efisiensi pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal ". (<http://www.imo.org/About/HistoryOffIMO/Pages/Default.aspx> diakses pada 30 Agustus 2012).

3.2 Gambaran Umum Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)

Fungsi laut tidak terlepas dalam menjembatani aktivitas-aktivitas yang dilakukan

antara daratan satu ke daratan lainnya baik yang kepemilikannya bersifat nasional atau bahkan teritori milik negara lain. Maka dari itu perlu adanya kerjasama atau interaksi antar negara yang memiliki kepentingan dalam jalur perairan yang menjadi kebutuhan bersama dan secara geografis juga menjadi bagian wilayah negara, hal ini berfungsi sebagai bentuk tanggungjawab bersama dalam menjaga kelestarian wilayah perairan. Seperti halnya wilayah laut di Asia Timur yang berbatasan langsung dengan beberapa negara meliputi Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah ini meliputi serangkaian ekosistem laut yang besar, sub regional laut, daerah pesisir, dan lembah sungai yang terkait yang saling terhubung dalam skala besar, sebagai tempat perubahan iklim kelautan dan proses alam berupa fenomena, misalnya siklus angin topan, dan migrasi spesies yang membuat wilayah perairan di Asia Timur begitu dinamis.

3.2.1 Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia (SDS-SEA)

Keputusan untuk menyiapkan Strategi Pembangunan Berkelanjutan untuk wilayah perairan Asia Timur muncul dari pertemuan intergovernmental meeting dari 11 negara Asia Timur yang diselenggarakan di Dalian pada Juli 2000. Negara yang ikut serta adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, Laos, Cina, Korea Selatan, Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.

3.2.1.1 Visi, Misi dan *Framework* SDS-SEA

Dalam melaksanakan tujuannya, SDS-SEA memiliki visi sebagai berikut: "Sistem sumber daya dari Pembangunan berkelanjutan di wilayah perairan Asia Timur adalah warisan alam bagi masyarakat di wilayah ini; media

akses ke pasar regional dan global; perlindungan untuk persediaan makanan yang sehat dan aman; penghidupan yang layak; kemakmuran ekonomi untuk eksistensi generasi yang akan datangl.

3.2.2 *Integrated Coastal Management* (ICM)

Strategi pembangunan berkelanjutan untuk wilayah perairan di Asia Timur (SDS-SEA) memiliki kerangka strategi yang berdasarkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil dengan aksi globalnya yang dikenal dengan Agenda 21, khususnya Bab 17 tentang rencana aksi —*Protection of Oceans, All kind of Seas, Including Closed and Semi-Closed Seas, and Coastal Areas and the Protection, Rational Uses and Development Their Living Resources* telah melahirkan kesepakatan bahwa menangani dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat multi dimensi (sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan) di wilayah pesisir, diperlukan suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh (*holistic*) dan terpadu (*integrated*).

3.2.3 Sejarah Perkembangan PEMSEA dalam Isu Lingkungan Hidup untuk Wilayah Perairan Asia Timur

Berawal sejak dari intervensi Global Environment Facility (GEF) sebuah lembaga independen yang bergerak dalam pendanaan untuk kegiatan atau proyek di bidang lingkungan hidup pada Desember 1993, ketika proyek air internasional yang pertama diluncurkan oleh GEF di wilayah Asia Timur dengan fokus utama pada pencegahan dan pengelolaan pencemaran laut dengan mendirikan situs terpadu pengelolaan pesisir percontohan di Xiamen, Cina dan di Batangas Bay, Filipina; juga berupaya memobilisasi subregional yang masih

berhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur (Indonesia, Malaysia dan Singapura) untuk mengatasi masalah pencemaran laut di Selat Malaka dan Selat Singapura, dan memperkuat pembangunan kapasitas, terutama di negara berkembang seperti Kamboja, Cina, Korea, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam (<http://beta.pemsea.org/about-pemsea/history> diakses pada 5 Mei 2012).

3.2.4 Kronologis Bergabungnya Indonesia dalam PEMSEA

Indonesia sebenarnya telah terlibat aktif dalam forum internasional bersama negara-negara yang memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur sejak tahun 1993 dalam pengelolaan pencemaran laut di Selat Malaka dengan mengutarakan masalah ini hanya pada forum-forum informal kepada tiap-tiap negara di wilayah Asia Timur. Ternyata respon dari tiap-tiap negara di wilayah Asia Timur juga merasakan hal yang sama terhadap pengelolaan wilayah laut yang sifatnya transboundary, tidak dapat diatasi oleh negara sendiri melainkan harus dan lebih efektif jika melibatkan negara-negara tetangga yang sama-sama memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

3.2.4.1 Implementasi *Sustainable Development Strategy for The Seas of East Asia (SDS-SEA)* di Indonesia

Indonesia telah mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk produk hukum. Berikut bentuk implementasi SDS-SEA di Indonesia yang penulis sajikan melalui tabel berikut:

Tabel. 3.1 *Indonesia's Contribution to the Implementation of the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia(2003-2011)*

SDS-SEA related Legislation, Policies and Plans	
Coastal and Water Resources Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Act No.7/2004 on integrated water resources management at the basin level 2. Act No. 32/2004 on decentralization of authorities and responsibilities in coastal and marine management 3. Act No.27/2007 concerning management of coastal zones and small islands provides the framework
Development and Spatial Planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. NA. 25/2005 (The Development Plan Act) provides a systematic process of development planning and preparing multi-year action plans from the district, to the provincial and national level. 2. NA Nos. 32 and 33/2004 on development and management of province and districts. 3. National Act (NA) No.26/2007 on Spatial Planning, including coastal and marine areas.
Biodiversity and Habitat Protection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP, 2003) guides the implementation of national biodiversity program until 2020 2. Presidential Instruction No.16/2005 supporting the development of marine tourism and enhancing management and control of National Marine Park sustainability 3. Biodiversity Basic Law (2008)
Fisheries	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisheries law No. 31/2004 2. Government regulation No.60/2008 on fish conservation

	3. NA No. 45/2009 on Fisheries Management
Pollution Reduction and Waste Management	1. Ministerial Decree No.51 on Seawater Quality Standard (2004) 2. Ministerial Decree No.75 on Organization and Management of National Cleaner Production Center (2004) 3. Municipal Solid Management Law No.18/2008 4. National Act No.32/2009 Environmental Control and Management
Information and Public Awareness	1. Walhi, WWF, COREMAP etc 2. National Biodiversity Networks collaboration between LIPI, Universities and BAKOSURTANAL. 3. National Universities Networks in Fisheries and Marine Sciences (F2PT) involving 63 universities in Indonesia
ICM implementation	1. Demonstration Site: Bali Province (2000) 2. Parralel Site: Sukabumi Regency (2003) and Jakarta Bay 3. Law: NA 27/2007 on coastal and small islands management, NA 32/2009 on environmental protection and control, NA 32/2004 for coastal resource management 4. Projects: COREMAP, MCRMP, BOBLME, ATSEA, and CTI.

(sumber : PEMSEA, 2012)

3.2.5 Jaringan Komunikasi Internasional dan Sistem Informasi PEMSEA

Mekanisme koordinasi wilayah yang dilakukan oleh negara-negara anggota merupakan pendekatan yang unik dan inovatif untuk pengelolaan laut. Mekanisme ini tidak

mengikat secara hukum, seperti halnya dengan konvensi regional. Sebaliknya, hal tersebut itu merupakan suatu pengaturan didirikan yang mengacu pada prinsip-prinsip keanggotaan, dan didedikasikan untuk pencapaian visi bersama dan tujuan dari SDS-SEA.

3.2.5.1 Country Partners

Keanggotaan dalam Country Partners merupakan negara-negara yang berada dalam wilayah perairan Asia Timur yang langsung memiliki keterhubungan dengan wilayah perairan Asia Timur baik langsung maupun tidak langsung yang diresmikan pada tahun 2002 saat Deklarasi Putra Jaya di Malaysia. Saat ini terdapat 11 negara yang tergabung dalam Country Partners antara lain (Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Indonesia, Filipina, Jepang, Timor Leste, Laos dan Vietnam). Tiap-tiap negara yang tergabung dalam keanggotaan Country Partners memiliki National Focal Point yaitu Representatif negara anggota sebagai pusat informasi mengenai PEMSEA di negaranya yang biasanya di dudukkan pada kantor Pemerintahan pusat suatu negara. Untuk di Indonesia National Focal Point of PEMSEA adalah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PEMSEA, 2003).

3.2.5.2 Non-Country Partners

Non-Country Partners merupakan keanggota-an yang mendukung, mensponsori dan ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan SDS-SEA. Keanggotaannya dari berbagai macam latar belakang seperti Organisasi Internasional, LSM, ilmuwan, lembaga donatur keuangan dll yang serta merta mendukung dalam implementasi SDS-SEA yang selanjutnya dapat disebut sebagai PEMSEA Network Local Governments (PNLG) (PEMSEA, 2003).

3.2.5.2.1 PEMSEA Network Local Governments (PNLG)

Berdasarkan *Charter of the PEMSEA Network Local Governments for Sustainable Coastal Development* tahun 2005 PNLG sebelumnya bernama *Regional Network of Local Government (RNLG)* hingga pada akhirnya diubah menjadi *PEMSEA Network Local Governments (PNLG)* dalam —*Bali Resolution on the Establishment of the PEMSEA Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development* pada 27 April 2005 di Bali, Indonesia. Berdasarkan Charter PNLG, PNLG memiliki visi: —*Coastal areas throughout the East Asian Seas Region are managed in sustainable manner* (Charter of PNLG, 2005: Chapter II). Dan misi:

—*The PNLG's mission shall be to serve as a network of local government in the region, which, along with their stakeholders, shall promote the application of ICM as an effective management framework to achieve sustainable coastal development* (Charter of PNLG, 2005: Chapter II).

3.3 PEMSEA Network Local Government (PNLG) di Indonesia

Integrated Coastal Management (ICM) sebagai salah satu program yang dilahirkan dari SDS-SEA. Secara singkat ICM dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen sumberdaya alam dan lingkungan yang mempekerjakan melalui pendekatan integratif holistik dan proses perencanaan interaktif dalam mengatasi masalah manajemen yang kompleks di daerah pesisir dan laut. Baik itu mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang berdampak langsung pada perekonomian negara ataupun dalam pengendalian kerusakan ekosistem laut. Manajemen yang diberikan melalui ICM ini mencakup seluruh aktivitas yang bersinggungan

langsung dengan wilayah perairan laut dan pesisir termasuk terumbu karang.

Pelaksanaan ICM di Indonesia dalam kerangka PEMSEA telah diterapkan di tiga wilayah di Indonesia yakni Bali, Jakarta dan Sukabumi yang merupakan bagian daripada PNLG. Saat ini di Indonesia baru tiga wilayah tersebut yang menggunakan Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM), hal ini dikarenakan ingin fokus pada titik-titik yang memang terjadi banyak kerusakan dan memerlukan pengelolaan pesisir secara terpadu (PEMSEA, 2003).

3.3.1 PEMSEA Network Local Government (PNLG) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi terletak di provinsi Jawa Barat di pantai selatan Pulau Jawa, sekitar 170km dari ibukota Indonesia, Jakarta. Ini adalah bagian dari kawasan ekonomi berkembang pesat dari Jakarta dan kota-kota serta kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Diberkati dengan keajaiban alam seperti gunung, sungai, pantai dan Teluk indah yang berdekatan dari Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi menyadari potensi besar dari daerah tersebut dan berkomitmen untuk mengejar perkembangan ekonomi kota maritim melalui pengembangan wisata pantai, perikanan dan lainnya terkait dengan layanan dan industri.

3.3.1.1 Kronologis bergabungnya Kabupaten Sukabumi dalam PEMSEA Network Local Governments (PNLG)

Kabupaten Sukabumi bergabung dalam PNLG karena melihat bahwa potensi untuk mengembangkan pengelolaan pesisir terpadu dalam wadah internasional sangat membantu untuk pengelolaan wilayah pesisir kabupaten Sukabumi. Hal tersebut bermula ketika Kementerian Lingkungan Hidup di tahun Hal tersebut bermula ketika Kementerian

Lingkungan Hidup di tahun 2002 (saat itu masih sebagai Departemen Lingkungan Hidup) melaksanakan program kerja di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan wilayah pesisir berskala nasional. Program tersebut bernama —Pantai Lestari yang dibuat berdasarkan ketentuan negara melalui Amanat Kebijakan Negara yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi pembangunan sehingga fungsi lingkungan harus dilestarikan guna menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai perwujudan dari REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sesuai pada agenda 21 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012).

3.4 Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Kabupaten Sukabumi terletak antara 6057'-7 025' Lintang Selatan dan 106049'- 107000' Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi antara lain: disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, disebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia (Samudera Hindia). Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah pesisir Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Barat yang memiliki luas sebesar 4.128 km² atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa dengan panjang garis pantai sekitar 117 km (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011).

Karakteristik umum oseanografi Kabupaten Sukabumi berhadapan dengan Samudera Hindia, namun terlindung karena berbentuk teluk. (Sugiarto dan Birowo, 1975). Tinggi Gelombang di Palabuhanratu dapat berkisar antara 1–3 meter (Pariwono et. al., 1988). Kondisi kualitas air

perairan laut di Kabupaten Sukabumi, tergolong bagus yang tercermin dari penampakan air yang bening dan kecerahan (cahaya matahari yang dapat menembus perairan mencapai 6–7 meter), meskipun demikian di beberapa muara sungai besar perairannya terlihat coklat terutama pada musim hujan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2011).

3.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, bertujuan untuk menngambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki, yang kemudian pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang diteliti (Nasir, 1988:63).

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistem, yang didukung oleh teknik pengumpulan data: Studi Kepustakaan, Penelusuran data online, Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Usaha-usaha yang dilakukan PEMSEA untuk menjalankan Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat

Pemerintah Sukabumi mengadopsi program pengelolaan pesisir terpadu atau integrated coastal management sejak tahun 2003 yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum Of Agreement* dengan GEF/UNDP/IMO

PEMSEA regional program pada tanggal 24 Februari 2003 di Palabuhanratu dalam suatu kerangka program —Building Partnerships on Environmental Protection and Management of the east asian seas. MOA tersebut menetapkan kabupaten sukabumi sebagai Parralel Site yang ketiga dalam pengelolaan pesisir dan laut di Asia Timur. Dalam pelaksanaan program sukabumi ICM, telah dibentuk kelembagaan yaitu Programme Coordinating Committee (PCC) dan Programme Management Office (PMO). PCC beranggotakan para kepala OPD terkait dan duduk sebagai ketua adalah wakil bupati Sukabumi. Sedangkan PMO beranggotakan unsur teknis dari OPD serta stakeholder lainnya. Duduk sebagai ketua PMO adalah Badan Lingkungan Hidup (Badan Lingkungan Hidup, 2012).

4.2 Kendala-kendala dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat

Lazimnya pelaksanaan program dari sebuah kerangka kerjasama seringkali ditemukan berbagai kendala yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan program yang disepakati bersama. Seperti halnya dengan ICM, pelaksanaan ICM sebagai bentuk upaya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis dan nonteknis yang berasal dari pihak pelaksana di lapangan yang melibatkan banyak sektor (Pemerintah Kabupaten Sukabumi) dan pihak penggagas atau fasilitator dalam kerangka kerjasama (PEMSEA).

4.2.1 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem

Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Kendala-kendala yang dihadapi yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Menyikapi kepindahan ibukota kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu pada tahun 2001 membuat konsentrasi terhadap program yang sudah dan akan direncanakan menjadi terganggu. Perencanaan-perencanaan program yang sudah dipetakan menjadi sulit untuk ditindaklanjuti karena konsentrasi terpecah.
2. Kurangnya koordinasi antar sektoral Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang terkait dalam implementasi ICM menjadi kendala yang cukup signifikan dalam mengolah data kerusakan terumbu karang yang sudah ada. Karena ICM tidak melibatkan pada satu sektor namun berbagai multisektor yang membutuhkan banyak SDM dan biaya yang tidak sedikit.
3. Terkendala dalam Pembiayaan. Laporan-laporan mengenai kerusakan terumbu karang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi tidak diteruskan untuk ditindaklanjuti karena proses pembiayaan untuk melakukan penelitian kembali cukup besar dan anggaran yang ada tidak mencukupi sehingga proses eksekusi menjadi terhambat.

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh PEMSEA dalam Menjalankan Program ICM untuk Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kendala-kendala yang dirasakan instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam implementasi ICM merupakan kendala PEMSEA secara keseluruhan karena pelaku yang melaksanakan program ICM untuk PNLG

Kabupaten Sukabumi adalah pihak-pihak instansi pemerintahan daerah kabupaten Sukabumi. Ketika program ICM dapat di implementasikan tanpa kendala maka PEMSEA akan menerima laporan hasil implementasi ICM juga tanpa kendala baginya, sebaliknya ketika terjadi banyak kendala dalam mengimplementasi-kan program ICM maka PEMSEA akan mendapatkannya juga sebagai kendala yang harus di evaluasi.

4.3 Hasil Pelaksanaan dari Program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat

Pelaksanaan dari program Integrated Coastal Management (ICM) dalam pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat mendapatkan hasil bahwa lingkungan pesisir Kabupaten Sukabumi saat ini sejak tahun 2003 mulai tertata dengan baik dengan terlaksananya proyek pengembangan yang dilakukan berbagai sektor instansi pemerintahan Kabupaten Sukabumimelalui pelaksanaan program ICM sebagai sebuah pengelolaan pesisir terpadu. Dengan dilakukannya berbagai aktivitas yang mendukung implementasi program ICM ini telah mencakup daripada fungsi utama ICM yakni perencanaan kawasan, promosi pengembangan ekonomi, pengawasan dan perlindungan sumberdaya, penyelesaian konflik, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

4.4 Analisa Peranan PEMSEA melalui Program Integrated Coastal Management dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi- Jawa Barat

PEMSEA melakukan peranan dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang dengan program ICM-nya di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi sebagai koordinator untuk program ICM di Kabupaten Sukabumi yang merupakan konsep pengelolaan secara menyeluruh untuk menjaga ekosistem yang menunjang bagi pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih belum optimal dalam menyentuh langsung aksi atau upaya tindak lanjut untuk kerusakan terumbu karang yang terjadi di Sukabumi karena kendala-kendala yang dihadapi masih belum terselesaikan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Dari paparan pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Peranan Partnerships in the Environmental Management for Seas of East Asia melalui program Integrated Coastal Management (ICM) dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Luas kawasan terumbu karang yang ada di Kecamatan Ciracap, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sekitar 1.305 Ha. Kawasan terumbu karang tersebut mengalami kerusakan dengan kondisi kurang baik sekitar 50% dalam keadaan rusak dengan tutupan kurang dari 10%. Berdasarkan data terakhir luas terumbu karang yang masih kategori bagus sekitar 22,8ha (RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009). Jenis-jenis karang yang teridentifikasi terdiri dari karang otak dan karang meja. Terumbu karang di Ujung Genteng terdapat pada 3 (tiga) titik lokasi (RTRW Pesisir Kabupaten Sukabumi, 2009).

2. Upaya-upaya yang dilakukan PEMSEA melalui program ICM dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi antara lain dengan implementasi ICM yang dilakukan oleh berbagai sektor terkait sebagai Project Coordinating Committee (PCC) dan Program Management Office (PMO) sesuai dengan fungsi utama ICM yaitu pertama, sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan sumberdaya yang ditunjukkan dengan melakukan rencana zonasi pesisir dan laut sebagai bentuk langkah awal untuk menempatkan titik-titik atau spot-spot kawasan yang dilindungi ditahun 2009, melakukan konservasi air, rehabilitasi ekosistem estuari dan rekonstruksi saluran irigasi di tahun 2004. Kedua, sebagai bentuk penyelesaian konflik yang ditunjukkan dengan upaya sosialisasi mengenai ICM oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi termasuk didalamnya sosialisasi mengenai arti pentingnya terumbu karang bagi kehidupan kepada masyarakat lokal pesisir Kabupaten Sukabumi di tahun 2004. Dan melaporkan secara periodik mengenai hasil perkembangan ICM di Kabupaten Sukabumi kepada PEMSEA melalui pertemuan-pertemuan rutin PEMSEA seperti EAS Congress yang dilakukan setiap tiga tahun sekali.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ICM yang dilaksanakan di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang telah melibatkan banyak sektor di lingkungan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi diantaranya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sukabumi).
4. Hasil yang dirasakan dari implementasi ICM dalam pengendalian kerusakan terumbu karang di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meskipun masih belum dilakukan pada tataran aksi langsung dengan mengadakan konservasi namun dengan mulai tertatanya lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi dengan ditunjukkannya pembangunan sistem, manajemen dan infrastruktur lingkungan hidup di wilayah pesisir kabupaten Sukabumi untuk mendukung kelestarian ekosistem-ekosistem yang saling terhubung satu sama lain di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Sukabumi. Termasuk turut mendukung pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadi di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan.

5.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini banyak menemukan kekurangan baik karena keterbatasan kapabilitas penulis, maupun kendala-kendala non teknis. Peneliti ingin memberikan saran yang peneliti yaitu :

1. Pola komunikasi yang dibangun oleh PEMSEA hendaknya bersifat proaktif terhadap anggotanya agar upaya dalam mengimplementasikan program ICM dapat lebih mendetail dan spesifik sehingga mengetahui akar permasalahannya.
2. PEMSEA hendaknya membangun sekretariat khusus PEMSEA ditiap negara-negara anggota agar kedudukan dan perannya ke masyarakat lebih terlihat dan agar pula kontrol dapat dilakukan dengan proses yang maksimal dan biaya yang minim.

3. Untuk Badan Lingkungan Hidup Sukabumi hendaknya meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif ke semua sektor yang memiliki keterhubungan dan kapasitas dengan wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi agar implementasi ICM dapat diintegrasikan secara menyeluruh dengan efektif dan efisien.
4. Untuk pemerintah Indonesia, hendaknya juga bersifat cepat tanggap dalam mengatasi pengendalian kerusakan terumbu karang dengan menyiapkan perencanaan yang matang berikut SDM yang ahli dalam bidang tersebut dan melakukan upaya-upaya yang efektif untuk program edukasi bagi masyarakat lokal pesisir.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku :

Burchill, Scott and Andrew Linkalter. 2009. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung. Nusa Media.

Matthew, Patternson. 2001. *Theories of International Politics*. New York. Palgrave Macmillan

May, Rudy Teuku. 2011. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung. PT. Refika Aditama.

_____. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT. Refika Aditama.

_____. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung. PT Refika Aditama

_____. 1993. *Pengantar Ilmu Politik*:

Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Bandung. Eresco

Nasir, Muhammad. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Galia Indonesia

Perwita, A.A Banyu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Acuan dari Internet

International Organization. <http://beta.pemsea.org/>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.

About PEMSEA. <http://beta.pemsea.org/about-pemsea>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.

History. <http://beta.pemsea.org/aboutpemsea/history>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012. Programs and Projects. <http://beta.pemsea.org/programmes-and-projects>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2012.

Ekosistem Laut-Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan. <http://pplhpuntondo.org/program/ekosistem-laut/>. Diakses pada Tanggal 8 Febuari 2012.